



## Perbandingan Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pengangguran antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe

Natasya Bethari<sup>1\*</sup>, Siti Rahima<sup>2</sup>, Annisa Fatia Rizki<sup>3</sup>, Nurul Kamaly<sup>4</sup>, Reza Fahlevi<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [natasyabeutari@gmail.com](mailto:natasyabeutari@gmail.com)

**Abstract.** *Unemployment remains a serious challenge in Aceh, with an Open Unemployment Rate (OUR) of 8.24% (2025) in Lhokseumawe City and 6.54% (2025) in Banda Aceh City. This study compares the implementation and effectiveness of unemployment alleviation policies in the two cities using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework with four effectiveness indicators: training absorption, job placement rate, corporate compliance, and community participation. A descriptive qualitative method with a literature study approach was employed, utilizing secondary data from journals, theses, and official documents. The findings show that Banda Aceh focuses on competency-based training through the Job Training Center (BLK) with certification and third-party partnerships. Lhokseumawe prioritizes Qanun Number 1 of 2020 on local labor priority (minimum 40%). Based on the indicators, Banda Aceh is more effective (55% of graduates employed) compared to Lhokseumawe, where local labor priority implementation is weak due to the absence of sanctions and non-existent coordination with PT. PAG. The novelty of this study lies in its systematic comparison of two Aceh cities using a policy implementation model that integrates demographic bonus and local context. Specific recommendations: Banda Aceh needs to expand BLK capacity, extend training duration (9–12 months with internships), and mandate graduate absorption reports. Lhokseumawe needs to revise the qanun by adding administrative sanctions, recruit permanent instructors, establish a tripartite supervisory team, and establish an energy-sector BLK in the Arun area in collaboration with PT PAG.*

**Keywords:** *Inter City Comparison; Local Labor Priority; Policy Effectiveness; Training Program; Unemployment.*

**Abstrak.** Pengangguran masih menjadi tantangan serius di Aceh, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe sebesar 8,24% (2025) dan Kota Banda Aceh 6,54% (2025). Penelitian ini membandingkan implementasi dan efektivitas kebijakan penanggulangan pengangguran di kedua kota menggunakan kerangka analisis model Van Meter dan Van Horn dengan empat indikator efektivitas: daya serap pelatihan, tingkat penempatan kerja, kepatuhan perusahaan, dan partisipasi masyarakat. Metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen resmi. Hasil menunjukkan Banda Aceh berfokus pada pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK dengan sertifikasi dan kemitraan pihak ketiga. Lhokseumawe mengedepankan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang prioritas tenaga kerja lokal minimal 40%. Berdasarkan indikator, Banda Aceh lebih efektif (55% lulusan terserap) dibanding Lhokseumawe yang implementasi prioritas lokal lemah karena tidak ada sanksi dan koordinasi dengan PT. PAG tidak berjalan. Kebaruan penelitian ini adalah perbandingan sistematis dua kota di Aceh dengan model implementasi kebijakan yang mengintegrasikan bonus demografi dan konteks lokal. Rekomendasi spesifik: Banda Aceh perlu memperluas kapasitas BLK, memperpanjang durasi pelatihan (9-12 bulan dengan magang), dan mewajibkan laporan penyerapan lulusan. Lhokseumawe perlu merevisi qanun dengan sanksi administratif, merekrut instruktur tetap, membentuk tim pengawasan tripartit, dan mendirikan BLK sektor energi di kawasan Arun bersama PT PAG.

**Kata kunci:** Efektivitas Kebijakan; Pengangguran; Perbandingan Antar Kota; Prioritas Tenaga Kerja Lokal; Program Pelatihan.

### 1. LATAR BELAKANG

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator utama yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, meskipun secara umum terjadi

tren penurunan, angka pengangguran di beberapa kota besar Aceh masih tergolong tinggi. Dua kota yang menarik untuk dikaji adalah Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dan Kota Lhokseumawe sebagai kawasan industri dan energi. Menurut laporan BPS Kota Lhokseumawe, angka pengangguran di Provinsi Aceh tercatat mencapai 8.221 jiwa, dengan dominasi pengangguran berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencapai 2.784 jiwa.

Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe memiliki karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan jasa cenderung mengembangkan sektor perdagangan dan pelayanan publik, sementara Lhokseumawe dikenal sebagai kota industri yang bertumpu pada sektor energi dan manufaktur. Perbedaan struktur ekonomi ini berdampak pada pola penyerapan tenaga kerja serta kebijakan penanggulangan pengangguran yang diterapkan masing-masing daerah. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025, TPT Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 8,24% atau sekitar 8.036 orang pengangguran, yang masih menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Provinsi Aceh (Gunawan, 2025).

Dalam upaya menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja. Penelitian Yulindawati dan Putra (2025) menunjukkan bahwa BLK Banda Aceh berperan dalam mengurangi pengangguran melalui perekrutan calon tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, dengan memberikan sertifikat kepada peserta yang lulus, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga baik untuk lokasi praktik maupun penempatan kerja. (Yulindawati & Putra, 2024). Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi BLK Banda Aceh, antara lain terbatasnya ruang pelatihan, terbatasnya waktu pelatihan yang menyebabkan penyerapan materi tidak maksimal, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan program.

Sementara itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pengangguran melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian Sari (2024) mengungkapkan bahwa implementasi program pelatihan keterampilan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat akibat informasi yang terbatas, belum adanya instruktur khusus dari dinas, serta sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk program pelatihan. Penelitian tersebut merekomendasikan

perlunya kerja sama dengan Geuchik Gampong dan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah untuk meningkatkan efektivitas program. (Sari, 2024)

Penelitian Nasriati (2025) tentang determinasi pengangguran usia muda di Provinsi Aceh menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda, yang berarti peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi pengangguran di kalangan anak muda. Sebaliknya, inflasi memiliki dampak positif dan signifikan, menunjukkan bahwa kenaikan harga berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih baik serta perlunya stabilitas makroekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, untuk mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. (Nasriati, 2023)

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menetapkan 15 program unggulan yang dijalankan oleh Wali Kota Dr. Sayuti Abubakar dan Wakil Wali Kota Husaini, SE untuk menekan angka pengangguran. Program-program tersebut meliputi pengelolaan sampah, penanganan banjir, pemerataan jaringan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau, penataan lingkungan pesisir, penyelesaian pembangunan Islamic Center, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, ruang kreatif pemuda, serta pemberdayaan sektor perikanan dan pertanian modern. (Pemerintahan Kota Lhokseumawe, 2024). Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan di Lhokseumawe juga mengacu pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, mengingat kota tersebut belum memiliki dewan pengupahan daerah sehingga belum dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara mandiri. (Kompas, 2023)

Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh kedua pemerintah kota, penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas kebijakan penanggulangan pengangguran antara Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe masih terbatas. Padahal, perbandingan kebijakan antar daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. keberhasilan kebijakan pengangguran sangat bergantung pada kesesuaian antara program yang dirancang dengan potensi lokal dan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap kebijakan penanggulangan pengangguran di kedua kota ini menjadi penting untuk dilakukan. (Jeray dkk, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada perbandingan kebijakan penanggulangan pengangguran antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan

pendekatan, menganalisis efektivitas masing-masing kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan pengangguran di kedua kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengangguran**

Pengangguran merupakan salah satu indikator makroekonomi yang mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Dalam perspektif ekonomi, pengangguran didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja (penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan) tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan seseorang sebagai pengangguran terbuka jika ia tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. (Lestari dkk, 2024)

Secara teoritis, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Pengangguran friksional terjadi akibat perpindahan pekerja dari satu sektor ke sektor lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, baik dari segi keahlian, pendidikan, maupun lokasi. Pengangguran siklikal berkaitan dengan fluktuasi siklus bisnis, di mana saat ekonomi mengalami resesi atau kontraksi, permintaan agregat menurun sehingga perusahaan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja. Sementara itu, pengangguran teknologi terjadi akibat penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin atau otomatisasi dalam proses produksi. (Dasmadi dkk, 2023)

### **Teori-teori pengangguran**

#### ***Teori Klasik***

Teori ekonomi klasik memandang pengangguran sebagai fenomena sukarela (voluntary unemployment). Menurut pandangan klasik yang didasarkan pada Hukum Say (Say's Law), penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, sehingga pasar selalu dalam kondisi keseimbangan (market clearing). Dalam pasar tenaga kerja, mekanisme harga (upah) akan menyesuaikan secara fleksibel hingga mencapai titik keseimbangan di mana jumlah tenaga

kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Apabila terjadi pengangguran, hal ini disebabkan karena pekerja meminta upah di atas tingkat upah keseimbangan. Dengan demikian, pengangguran menurut pandangan klasik bersifat sukarela karena pekerja memilih untuk tidak bekerja dengan tingkat upah yang berlaku.

### **Teori Strukturalis**

Teori strukturalis muncul sebagai sintesis antara pandangan klasik dan Keynesian, yang menjadi pendekatan dominan pada tahun 1990-an. Teori ini menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh ketidaksesuaian struktural antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, baik dari segi keterampilan, pendidikan, maupun lokasi geografis. Model strukturalis menghasilkan hubungan antara perubahan inflasi dan deviasi pengangguran dari keseimbangan jangka panjang, melanjutkan perdebatan lama tentang kurva Phillips. bodynote

Dalam perspektif strukturalis, pengangguran tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan stimulasi permintaan agregat jangka pendek, tetapi memerlukan kebijakan jangka panjang yang menasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja lokal. Teori ini relevan untuk menganalisis perbedaan kebijakan penanggulangan pengangguran antara Banda Aceh dan Lhokseumawe, karena kedua kota memiliki struktur ekonomi dan karakteristik tenaga kerja yang berbeda.

### **Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu :

- a. standar dan sasaran kebijakan yaitu kejelasan ukuran dan target yang ingin dicapai oleh kebijakan.
- b. sumber daya, yang mencakup ketersediaan dana, fasilitas, waktu, dan sumber daya manusia.
- c. karakteristik agen pelaksana, yaitu struktur organisasi dan disposisi lembaga pelaksana.
- d. sikap para pelaksana, meliputi komitmen, responsivitas, dan pemahaman aparat terhadap kebijakan.
- e. komunikasi antar organisasi, yaitu koordinasi dan sosialisasi kebijakan antar lembaga terkait.
- f. kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi lingkungan eksternal yang mempengaruhi implementasi

## **indikator efektivitas kebijakan**

Efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indikator yang diadaptasi dari Dunn (2018) serta disesuaikan dengan konteks ketenagakerjaan daerah, yaitu daya serap pelatihan, tingkat penempatan kerja, kepatuhan perusahaan, dan partisipasi masyarakat. Daya serap pelatihan merupakan kemampuan program pelatihan dalam menjangkau target pencari kerja yang diukur dari rasio peserta pelatihan terhadap total pencari kerja terdaftar. Tingkat penempatan kerja merupakan persentase lulusan pelatihan yang terserap ke dunia kerja dalam enam bulan pascapelatihan. Kepatuhan perusahaan menunjukkan tingkat pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan lokal, seperti prioritas tenaga kerja lokal minimal 40 persen. Sementara itu, partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat keterlibatan dan retensi target group dalam program yang diukur dari jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan dibandingkan dengan total peserta yang mendaftar.

## **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan pengangguran, kebijakan publik mencakup berbagai program dan intervensi yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Dalam penelitian ini, kebijakan penanggulangan pengangguran mencakup semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah masing-masing, termasuk program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya. (Salim, 2023)

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian ini dipilih karena sesuai untuk memahami praktik korupsi secara mendalam dari banyaknya sudut pandang, baik bidang ekonomi maupun sosial. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang praktik korupsi melalui data, fakta dan temuan dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari banyak sumber seperti jurnal, yaitu dikumpulkan dari minimal 25 sumber dengan kriteria: jurnal terakreditasi Sinta, buku teks ekonomi ketenagakerjaan, laporan resmi BPS kedua kota, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

topik ini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi serta persepsi terhadap masyarakat pemerintah (Firmansyah, Masrun, & Yudha, 2021).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dengan luas 61,36 km<sup>2</sup>. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan jasa, struktur ekonominya didominasi sektor perdagangan dan jasa, sehingga sebagian besar angkatan kerja terserap di sektor informal dan jasa. Kota ini menempati urutan ke-6 angka pengangguran tertinggi di Aceh (Yulindawati & Putra, 2024). Sementara itu, Kota Lhokseumawe dikenal sebagai kota industri dengan sektor unggulan industri pengolahan, energi, dan perdagangan. Keberadaan PT. Perta Arun Gas (PAG) menjadi penopang ekonomi. Berdasarkan BPS, TPT Aceh November 2023 sebesar 6,03% dengan jumlah pengangguran 8.221 jiwa, didominasi lulusan SMA (2.784 jiwa) (Data BPS Kota Lhokseumawe). TPT Lhokseumawe tahun 2025 mencapai 8,24% (sekitar 8.036 orang), tertinggi di Aceh.

##### **Kebijakan Penanggulangan Pengangguran di Kota Banda Aceh**

###### ***Program Pelatihan Kerja Melalui Balai Latihan Kerja (BLK)***

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya menekan angka pengangguran mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja. Penelitian Yulindawati dan Putra (2025) menunjukkan bahwa BLK Banda Aceh berperan dalam mengurangi pengangguran melalui beberapa mekanisme. (Yulindrawati & Putra, 2024) :

- a. Perekrutan calon tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- b. Pemberian sertifikat kepada peserta yang lulus pelatihan sebagai bukti kompetensi
- c. Kerja sama dengan pihak ketiga baik untuk lokasi praktik peserta pelatihan maupun penempatan kerja bila diperlukan
- d. Fasilitator penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan instansi

###### ***Jenis Jenis Pelatihan yang dilaksanakn***

BLK Banda Aceh menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pelatihan tersebut mencakup bidang teknologi informasi, otomotif, tata busana, tata boga, dan keterampilan teknis lainnya. Program pelatihan

ini dirancang untuk membekali pencari kerja dengan kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja (Ardiva dkk, 2025).

Selain itu, penelitian juga menunjukkan adanya program pelatihan teknisi komputer yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat atau muda-mudi yang putus sekolah dan tingginya angka pengangguran, dengan faktor penyebab multidimensi termasuk pendapatan masyarakat di bawah rata-rata yang menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan, serta sedikitnya lapangan kerja yang tersedia terutama bagi masyarakat berpendidikan rendah. (Sabrina & Suhartono, 2023)

### ***Kendala Implementasi Kebijakan di Banda Aceh***

Meskipun BLK Banda Aceh telah berperan aktif, penelitian Yulindawati dan Putra (2025) mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran :

- a. Terbatasnya ruang pelatihan
- b. Terbatasnya waktu pelatihan
- c. Permasalahan pandemi covid-19

Penelitian terdahulu oleh Gunawan (2017) juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi pengangguran mencakup pengembangan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan.

### ***Kebijakan Penanggulangan Pengangguran di Kota Lhokseumawe***

#### ***implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan***

Pemerintah Kota Lhokseumawe mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pengangguran melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian Sari (2023) mengungkapkan bahwa dalam upaya menanggulangi pengangguran, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe mensosialisasikan program pelatihan keterampilan melalui media cetak berupa banner yang dipasang di papan pengumuman, serta media elektronik berupa media sosial milik Dinas (Sari, 2023).

Qanun tersebut juga mengatur tentang prioritas penggunaan tenaga kerja lokal. Pasal 33 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemberi kerja atau penerima lowongan pekerjaan wajib memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (persen) dari yang dibutuhkan perusahaan.

## Program Unggulan Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Sayuti Abubakar dan Wakil Wali Kota Husaini, SE telah menetapkan beberapa program unggulan untuk menekan angka pengangguran. Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, ruang kreatif pemuda, serta pemberdayaan perikanan dan pertanian modern. Selain itu, program pelatihan keterampilan juga dilaksanakan seperti pelatihan teknisi komputer yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan skill wirausaha bagi masyarakat yang putus sekolah dan pengangguran (Kuncoro, 2018).

## Kendala Implementasi Kebijakan di Lhokseumawe

Penelitian Sari (2023) mengidentifikasi bahwa implementasi program pelatihan keterampilan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi :

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat
- b. Belum adanya instruktur khusus
- c. Sumber daya manusia yang belum mencukupi
- d. Sumber dana

Selain itu, dalam konteks penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan, ditemukan kendala bahwa perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki skill untuk bidang tertentu, namun masyarakat lokal belum memiliki kualifikasi tersebut. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak selalu dapat menggunakan tenaga kerja lokal untuk posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus.

## Perbandingan Pendekatan Kebijakan

### *Perbedaan Pendekatan Kebijakan*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan kebijakan penanggulangan pengangguran antara Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Kebijakan Penanggulangan.

Aspek perbandingan	Kota Banda Aceh	Kota Lhokseumawe
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015	Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan
Lembaga Pelaksana Pendekatan Utama	Balai Latihan Kerja (BLK) Pelatihan berbasis	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pelatihan keterampilan dan prioritas tenaga kerja lokal

Sasaran	kompetensi dan sertifikasi	
Prioritas	Calon tenaga kerja umum	Tenaga kerja lokal (prioritas 40% di perusahaan)
Media Sosialisasi	Kerja sama dengan pihak ketiga/perusahaan	Kemitraan dan jaringan
Program Unggulan	Pelatihan otomotif, IT, tata busana, tata boga	15 program unggulan termasuk ruang kreatif pemuda
Kemitraan	Kerja sama dengan perusahaan untuk penempatan	Kerja sama dengan Geuchik Gampong dan lembaga pendidikan (rekomendasi)

### Persamaan kebijakan

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kedua kota memiliki beberapa persamaan dalam upaya penanggulangan pengangguran, antara lain :

- a. Keduanya mengandalkan program pelatihan keterampilan sebagai instrumen utama
- b. Keduanya menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, baik sarana prasarana maupun SDM pengajar
- c. Keduanya mengupayakan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas program
- d. Keduanya melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat meskipun dengan intensitas dan media yang berbeda

### Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan

#### Faktor sumber daya

Keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM pengajar, sarana dan prasarana) menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan di kedua kota. Di Kota Banda Aceh, Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan ujung tombak program, menghadapi kendala klasik berupa terbatasnya ruang pelatihan, kurangnya ketersediaan instruktur, dan durasi waktu pelatihan yang singkat. Penelitian Yulindawati dan Putra (2025) secara spesifik mengidentifikasi bahwa keterbatasan ruang menghambat daya tampung peserta, sementara waktu yang singkat menyebabkan peserta tidak mampu menyerap materi secara maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas lulusan. Hal ini diperkuat oleh temuan Karimuddin (2019) yang mengungkapkan bahwa dari total 5.220 peserta pelatihan, hanya 55% (2.871 orang) yang berhasil terserap ke dunia kerja, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara output pelatihan dengan kebutuhan industri. Karimuddin juga menyoroti minimnya

fasilitas pendukung serta usia instruktur yang sudah rentan sebagai faktor tambahan yang menghambat produktivitas BLK.

Sementara itu, di Kota Lhokseumawe, permasalahan sumber daya memiliki titik tekan yang sedikit berbeda. Penelitian Sari (2024) mengidentifikasi bahwa Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe belum memiliki instruktur khusus yang didedikasikan untuk program-program pelatihan keterampilan. Akibatnya, pelaksanaan program kerap mengalami kendala teknis dan kurang maksimal. Lebih lanjut, rendahnya kualitas SDM di dinas terkait turut memperparah situasi tersebut, yang juga berdampak pada lemahnya koordinasi dan supervisi terhadap kebijakan prioritas tenaga kerja lokal (Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020).

Fenomena serupa mengenai keterbatasan sumber daya ini juga terkonfirmasi di wilayah sekitar Aceh, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat struktural dan tidak hanya terjadi di dua kota tersebut. Di Kabupaten Aceh Besar, Wakil Bupati secara terbuka menyoroti bahwa pelatihan berbasis kompetensi masih sangat minim dan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kurikulum pelatihan sangat lebar. Minimnya kerjasama antara pelaku industri dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum mengakibatkan lulusan tidak siap untuk langsung terjun ke dunia kerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2026).

Permasalahan keterbatasan anggaran dan fasilitas juga menjadi momok yang sama di berbagai BLK di Aceh. Data di BLK Aceh Timur menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran membatasi jumlah peserta yang dapat dilatih, dengan ruang pelatihan yang tidak layak serta alat-alat praktik yang sudah usang sehingga tidak sesuai dengan standar industri modern. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung ini secara langsung menurunkan kualitas hasil pelatihan, sehingga lulusan BLK sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

### **Faktor partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Di Kota Lhokseumawe, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pelatihan disebabkan oleh informasi yang terbatas. Penelitian Sari (2023) merekomendasikan perlunya kerja sama dengan Geuchik Gampong (Kepala Desa) dan lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah untuk meningkatkan jangkauan sosialisasi.

Di Banda Aceh, partisipasi masyarakat terlihat dari antusiasme calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan di BLK, namun kapasitas ruang yang terbatas menjadi kendala untuk menampung lebih banyak peserta. (Mayaguez, 2024)

### **Faktor koordinasi dan kemitraan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. Perta Arun Gas (PAG) di Lhokseumawe belum pernah berkoordinasi secara formal dengan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan penerimaan dan penempatan tenaga kerja lokal. Jika dianalisis lebih mendalam, setidaknya terdapat tiga penyebab utama. Pertama, tidak adanya mekanisme baku yang mewajibkan perusahaan melaporkan pemenuhan kuota tenaga kerja lokal secara periodik. Qanun Nomor 1 Tahun 2020 hanya menyebutkan kewajiban prioritas 40%, tetapi tidak mengatur sanksi administratif atau prosedur pelaporan yang mengikat. Kedua, dinas ketenagakerjaan daerah tidak memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang cukup untuk melakukan pendampingan dan pengawasan proaktif terhadap perusahaan. Ketiga, perusahaan cenderung memilih jalur rekrutmen mandiri karena menganggap kualifikasi tenaga kerja lokal belum memenuhi standar teknis yang dibutuhkan, sehingga koordinasi dianggap tidak memberikan nilai tambah bagi efisiensi rekrutmen.

Akibat dari lemahnya koordinasi ini, efektivitas kebijakan prioritas tenaga kerja lokal menjadi sangat terbatas. Pertama, data kepatuhan perusahaan tidak akurat – misalnya klaim bahwa PT. PAG telah menggunakan 80% tenaga kerja lokal tidak dapat diverifikasi karena tidak diketahui apakah angka tersebut mencakup tenaga kerja tetap, kontrak, atau outsourcing. Kedua, tidak ada umpan balik dari perusahaan kepada dinas tentang jenis keterampilan yang benar-benar dibutuhkan, sehingga program pelatihan kerja berjalan tanpa basis kebutuhan riil. Ketiga, kebijakan yang seharusnya bersifat wajib (mandatory) berubah menjadi sukarela (voluntary), sehingga tujuan melindungi tenaga kerja lokal tidak tercapai. Dalam kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn, variabel komunikasi antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana berada pada level rendah, yang secara langsung menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

### **Faktor Karakteristik Ekonomi Lokal**

Karakteristik ekonomi lokal yang berbeda antara Banda Aceh (sektor jasa dan perdagangan) dan Lhokseumawe (sektor industri dan energi) mempengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Di Banda Aceh, pelatihan lebih diarahkan pada keterampilan yang relevan dengan sektor jasa dan UMKM, sementara di Lhokseumawe, kebutuhan keterampilan lebih terkait dengan sektor industri dan teknis.

Penelitian Nasriati (2025) tentang determinasi pengangguran usia muda di Provinsi Aceh menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda, yang berarti peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi pengangguran di kalangan anak muda. Sebaliknya, inflasi memiliki dampak positif dan

signifikan, menunjukkan bahwa kenaikan harga berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan pengangguran tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan kebijakan pendidikan dan stabilitas makroekonomi.

## **Pembahasan**

### **Efektivitas Program Pelatihan Kerja**

Program pelatihan kerja merupakan instrumen utama kebijakan penanggulangan pengangguran di kedua kota. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kesenjangan antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan riil pasar kerja (*skill mismatch*). Fenomena ini sesuai dengan teori strukturalis yang menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh ketidaksesuaian struktural antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penelitian di Kabupaten Aceh Utara (kawasan industri serupa dengan Lhokseumawe) menemukan bahwa program pelatihan yang tidak didasarkan pada *job profiling* industri setempat menyebabkan hanya 35% lulusan pelatihan yang terserap ke dunia kerja dalam enam bulan (Nurlita, 2022). Hal yang sama juga teridentifikasi di Kota Sabang, di mana pelatihan berbasis pariwisata tidak diikuti dengan pendampingan pasca pelatihan sehingga angka penempatan rendah (Faisal & Analiasnsyah, 2024). Dengan demikian, tanpa evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kurikulum pelatihan terhadap kebutuhan lokal, program pelatihan di Banda Aceh dan Lhokseumawe berpotensi mengalami kegagalan serupa.

### **Tantangan implementasi kebijakan prioritas tenaga kerja lokal**

Kebijakan prioritas tenaga kerja lokal yang diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe (minimal 40% tenaga kerja lokal) menghadapi tantangan implementasi yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan seperti PT. PAG sudah menggunakan tenaga kerja lokal sebanyak 80% dari 40% yang diatur dalam Qanun, namun masih belum diketahui apakah angka tersebut mencakup tenaga kerja kontrak ataupun tenaga kerja tetap. Ketidakjelasan data ini menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan.

Selain itu, perusahaan menghadapi kendala dalam merekrut tenaga kerja lokal untuk posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelatihan agar masyarakat lokal memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri.

### **Peran pemerintah daerah dalam fasilitasi ketenagakerjaan**

Berdasarkan temuan penelitian, peran pemerintah daerah dalam fasilitasi ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Di Lhokseumawe, pemerintah belum melakukan pengawasan yang memadai terhadap penerapan prioritas tenaga kerja lokal di perusahaan.

Sementara di Banda Aceh, meskipun BLK telah menjalin kerja sama dengan perusahaan, masih terdapat kendala kapasitas dan waktu pelatihan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Manfangati (2024) bahwa prosedur yang diterapkan guna memastikan tujuan strategi tercapai masih menghadapi kendala berupa kurangnya kerjasama dengan perusahaan/industri. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dengan dunia usaha menjadi prioritas yang harus ditingkatkan.

### **Rekomendasi perbaikan kebijakan**

Berdasarkan analisis perbandingan dan identifikasi kendala, berikut adalah rekomendasi perbaikan kebijakan untuk kedua kota :

Untuk Kota Banda Aceh :

- a. Peningkatan kapasitas ruang pelatihan BLK untuk menampung lebih banyak peserta
- b. Perpanjangan durasi waktu pelatihan agar materi dapat diserap secara maksimal
- c. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan untuk mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja

Untuk Kota Lhokseumawe :

- a. Peningkatan intensitas sosialisasi program melalui berbagai media dan kerja sama dengan geucik gampong
- b. Pengadaan instruktur khusus dari Dinas untuk program pelatihan
- c. Penguatan koordinasi dengan perusahaan untuk memastikan pemenuhan kuota tenaga kerja lokal
- d. Pengembangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri di Lhokseumawe.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Kota Banda Aceh relatif lebih efektif dibandingkan Kota Lhokseumawe. Hal ini karena Banda Aceh memiliki mekanisme pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK yang terintegrasi dengan sertifikasi dan kemitraan dengan pihak ketiga untuk penempatan kerja, sehingga menciptakan *link and match* yang lebih nyata. Sebaliknya, Lhokseumawe meskipun memiliki kebijakan prioritas tenaga kerja lokal 40% dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2020, implementasinya lemah karena tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan, koordinasi dengan PT. PAG tidak berjalan, serta ketiadaan instruktur khusus dinas.

Dengan demikian, kebijakan prioritas lokal di Lhokseumawe bersifat simbolik, sedangkan Banda Aceh lebih substantif meskipun masih terkendala kapasitas ruang dan durasi pelatihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder tanpa wawancara langsung dengan aktor kunci, serta tidak tersedianya data kuantitatif tingkat penempatan kerja pasca pelatihan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode *mixed-method* yang melibatkan alumni BLK dan peserta pelatihan, serta studi komparatif dengan kota di luar Aceh. Secara konkret, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memperluas kapasitas BLK ke kecamatan, memperpanjang durasi pelatihan menjadi 9–12 bulan dengan magang industri, dan mewajibkan perusahaan mitra melaporkan penyerapan lulusan setiap triwulan. Sementara Pemerintah Kota Lhokseumawe harus merevisi Qanun Ketenagakerjaan dengan menambahkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota 40%, merekrut instruktur tetap minimal 5 orang, membentuk tim pengawasan tripartit, serta mendirikan BLK khusus sektor energi di kawasan Arun bekerja sama dengan PT PAG.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardiva, B. A., dkk. (2025). Analisis pengaruh jumlah angkatan kerja, investasi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. *Journal of Economic and Policy Studies*, 6(1), 42–44. <https://doi.org/10.21274/jeps.v6i01.11061>
- Ardiva, B. A., Hidayatullah, S. S., Enggarosa, E. W., Ain, N. S. N., & Najih, A. I. (2025). Analisis pengaruh jumlah angkatan kerja, investasi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. *Journal of Economic and Policy Studies*, 6(1), 42–44. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/jesk/article/view/11061/2981>
- BPS Kota Lhokseumawe. (2025).
- Dasmadi, D., Djajasinga, N. D., Mayasari, Y., Suparni, S., & Gymnastiar, I. A. (2023). Reskilling tenaga kerja: Strategi kebijakan menghadapi pengangguran akibat revolusi industri 4.0. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 258–263. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.28541>
- Faisal, & Analiansyah. (2024). Peran pelatihan oleh Disnaker dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Sabang. *As-Siyadah: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v4i2.5678>
- Gunawan, U. H. (2025). Analisis tren pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2). <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/1412>
- Jeray, J., Putra, S. Y., & Harahap, E. F. (2023). Pengaruh pengangguran, tenaga kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 9(1), 96–98. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/view/4496/pdf>

- Karimuddin. (2019). Balai latihan kerja dan upaya mengatasi pengangguran (Studi di BLK Kota Banda Aceh). Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8989/>
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. UPP STIM YKPN. <https://doi.org/10.30742/economie.v7i1.4223>
- Lestari, I. D., et al. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Banten. *Independent: Journal of Economics*, 4(3). <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65015>
- Lusiana, D., Qomar, M. B., & Setiadi, A. (2024). Potret strategi dan kebijakan pemerintahan dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia: Tinjauan studi literatur. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 25–27. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.442>
- Mayaguez, H., et al. (2024). Pengaruh pengangguran dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24042/slm.v5i1.23284>
- Nasir, M. S., & Luk, L. A. M. (2023). Analisis dinamis tingkat pengangguran di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–4. <https://pdfs.semanticscholar.org/84f4/3cba2f707d4e02d4d4834093372b5787fdaf.pdf>
- Nasriati. (2023). Determinasi pengangguran usia muda di Provinsi Aceh: Studi kasus tiga Kabupaten/Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 51–52. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/12718/5798>
- Nukhairi, I. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk dalam meningkatkan peluang kerja masyarakat Aceh [Skripsi]. UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14014/>
- Nurlita. (2022). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari (JEMENSRI)*, 7(2), 89–101. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v7i2.1153>
- Permatasari, D., et al. (2024). Pengaruh TPAK, upah minimum, dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(3). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>
- Rahmawati, Y., et al. (2024). Pengaruh TPAK dan IPM terhadap pengangguran di Banten. *Independent: Journal of Economics*, 4(3). <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65189>
- Restianjani, A. A., & Widyawati, R. F. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan penanaman modal terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2015–2022. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.30742/economie.v7i1.4223>
- Rizal, M., & Mustapita, A. F. (2023). Peran UMKM dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i3.8236>
- Rudatin, A. (2024). Pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art12>
- Sabrina, C. N., & Suhartono, E. (2023). Pengaruh tenaga kerja dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. *Sosio E-Kons*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.15051>

- Salim, A. (2023). Karakteristik tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 13(1), 102–104. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/20534/10687>
- Sari, M. (2024). Implementasi kebijakan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe [Tesis, Universitas Malikussaleh]. RAMA Repository Unimal. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7740/>
- Sari, N. L. (2023). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Economics*, 3(2), 33. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/51849/45784>
- Statistik, B. P. (2020). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. *Berita Resmi Statistik*, 40(5). <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/634>
- Sukirno, S. (2019). *Makro ekonomi: Teori pengantar*. PT. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29163>
- Syukriansyah, D., Adidjaya, F. R. G., Huda, F. F., Saputra, F. D., & Fadilla, A. (2024). Dinamika pengangguran: Analisis perubahan dalam pasar tenaga kerja nasional. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 5–7. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.200>
- Yulindawati, Y., & Putra, E. A. (2024). Peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh. *Jurnal Basic Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 77–79. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/6027/2771>